



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN PERIODE 30 JUNI 2025



**BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani 29,4 Guntung Manggis,
Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
Kalimantan Selatan
70721

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Banjarmasin, Juli 2025

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin SURAT ELEKTRONIK bkikls2bjm@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Banjarmasin, Juli 2025

Kepala,

Hafit Rahman, S.Pi, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 32,165,000 atau mencapai 80.67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 39,870,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 1,849,797,567 atau mencapai 32.73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5,651,149,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16,739,777,452 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 57,702,569; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 16,682,074,883; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 129,973,398 dan Rp. 16,609,804,054.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 10,536,000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 1,946,849,695 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1,936,313,695). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 21,629,000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (1,914,684,695).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 16,677,475,356 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (1,914,684,695) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1,847,013,393 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 16,609,804,054.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	TA 2025			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	39.870.000	32.165.000	7.705.000	80,67
Jumlah Pendapatan dan Hibah		39.870.000	32.165.000	7.705.000	80,67
Belanja	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.050.491.000	1.223.358.481	1.827.132.519	40,10
Belanja Barang	B.4	2.600.658.000	626.439.086	1.974.218.914	24,09
Belanja Modal	B.5	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
Jumlah Belanja		5.651.149.000	1.849.797.567	3.801.351.433	32,73

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM BANJARMASIN NERACA PER 30 Juni 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASSET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	15.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.4	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	42.702.569	25.069.045
JUMLAH ASET LANCAR		57.702.569	25.069.045
Aset Tetap			
Tanah	C.2	12.431.711.000	12.431.711.000
Peralatan dan Mesin	C.2.1	4.255.383.615	4.255.383.615
Gedung dan Bangunan	C.2.2	4.634.886.200	4.634.886.200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.3	276.361.500	276.361.500
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	-	8.618.479
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.5	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(4.916.267.432)	(4.916.267.432)
JUMLAH ASET TETAP		16.682.074.883	16.715.762.407
Aset Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			
Aset Lainnya			
Aset Tidak Berwujud	C.4	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA			
JUMLAH ASET		16.739.777.452	16.740.831.452
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.5	15.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	114.973.398	38.287.051
Utang yng Belum ditagihkan	C.5.2	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		129.973.398	38.287.051
JUMLAH KEWAJIBAN		129.973.398	38.287.051
Ekuitas			
Ekuitas	C.6	16.609.804.054	16.677.475.356
JUMLAH EKUITAS		16.609.804.054	16.677.475.356
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.739.777.452	16.715.762.407

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM BANJARMASIN LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
IATAN OPERASIONAL			
DAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.536.000	28.245.000
Jumlah PENDAPATAN		10.536.000	28.245.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.283.305.322	1.834.657.939
Beban Persediaan	D.3	33.495.002	18.278.475
Beban Barang dan Jasa	D.4	495.941.414	615.316.650
Beban Pemeliharaan	D.5	105.093.674	300.240.668
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.014.283	162.984.789
Beban Barang untuk	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9	-	273.618.247
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
Jumlah BEBAN		1.946.849.695	3.205.096.768
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.936.313.695)	(3.176.851.768)
IATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		21.629.000	-
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		-	(19.965)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lain		-	19.965
Jumlah SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	21.629.000	(19.965)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.914.684.695)	(3.176.871.733)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(1.914.684.695)	(3.176.871.733)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI KIPM BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	16.677.475.356	20.767.599.191
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.914.684.695)	(3.176.871.733)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1.847.013.393	2.747.897.562
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(67.671.302)	(428.974.171)
EKUITAS AKHIR	E.6	16.609.804.054	20.338.625.020

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Banjarmasin

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di

Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Banjarmasin, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Satker Pelabuhan Trisakti, wilker Batulicin dan Wilket Kotabaru

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

- 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
- 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
- 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

- 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
- 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*

4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Banjarmasin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai KIPM Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 5,651,149,000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	39,870,000	39,870,000
Jumlah Pendapatan	39,870,000	39,870,000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,050,491,000	3,050,491,000
Belanja Barang	2,600,658,000	2,600,658,000
Belanja Modal	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	5,651,149,000	5,651,149,000

Realisasi
Pendapatan
Rp. 32,165,000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 32,165,000 atau mencapai 80.67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 39,870,000. Pendapatan Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	39,870,000	32,165,000	80.67

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan			
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	39,870,000	32,165,000	80.67

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya TA 2025 mengalami Kenaikan 27.34 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Adanya Penjualan aset .

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	10,536,000	28,245,000	62.69
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	21,629,000	-	-
Jumlah	32,165,000	28,245,000	27.34

Realisasi Belanja
Rp 1,849,797,567

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Banjarmasin pada TA 2025 adalah sebesar Rp 1,849,797,567 atau 32.73% dari anggaran belanja sebesar Rp 5,651,149,000,. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,050,491,000	1,223,358,481	40.10
Belanja Barang	2,600,658,000	626,439,086	24.09
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	5,651,149,000	1,849,797,567	45
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	5,651,149,000	1,849,797,567	45

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami Penurunan dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berkurangnya Jumlah pegawai yang mengakibatkan Jumlah Anggaran Berkurang dan berkurangnya jumlah pegawai yg naik pangkat.
2. Terdapat beberapa kegiatan masih dalam pagu saldo blokir AA, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

**Perbandingan Realisasi Belanja
TA 30 JUNI 2025 dan 30 JUNI 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	1,223,358,481	1,745,994,500
Belanja Barang	626,439,086	1,029,123,062
Belanja Modal	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	1,849,797,567	2,775,117,562

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp.1,223,358,481*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1,223,358,481 dan Rp. 1,745,994,500. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 40.10 persen dari TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.102.257.767	1.624.143.982	0,67
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	121.101.234	117.589.807	1.03
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	4,261,000	
Jumlah Belanja Kotor	1,223,359,001	1,745,994,789	7.06
Pengembalian Belanja Pegawai	520	289	
Jumlah Belanja	1,223,358,481	1,745,994,500	7.06

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
626,439,086

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 626,439,086 dan Rp.1,029,123,062. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami Penurunan 6.60% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Berkurangnya kegiatan di Balai KIPM Banjarmasin karena anggaran dan kegiatan di alihkan ke BKHIT,
2. Adanya saldo Blokir AA yang mengakibatkan Kegiatan belum dapat terealisasi,

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	309,237,515	421,667,822	(7.3)
Belanja Barang Non Operasional	25,043,841	28,107,496	(8.9)
Belanja Persediaan	27,766,700	27,274,200	(1.01)
Belanja Jasa	136,302,073	143,898,729	(9.47)
Belanja Pemeliharaan	99,074,674	259,369,026	(3.81)
Belanja Perjalanan Dinas	29,014,283	148,805,789	(19.49)
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	626,439,086	1,029,123,062	6.60

Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	626,439,086	1,029,123,062	6.60

Belanja
Rp0

Modal

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2024 Karena Pada TA 2025 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja
Tanah Rp0

Modal

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

Jumlah Belanja Modal	-	-	-
-----------------------------	---	---	---

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung layanan perkantoran lebih kecil dari sebelumnya.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp57,702,569

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 57,702,569 dan Rp 25,069,045.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp15,000,000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.15,000,000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai		0
Bank BNI	15.000.000	0
Jumlah	15,000,000	0

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNPB		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0

(TP/TGR)
Rp0

dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker
disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai KIPM Banjarmasin
per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar
Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan
oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing
debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan
kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
R0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	0
Jumlah	-	0

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih

Harus Diterima Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp42,702,569

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 42,702,569 dan Rp. 25,069,045 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan

TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	12,922,693	11,659,452
Bahan untuk Pemeliharaan	875,000	3,673,000
Suku Cadang	730,900	4,416,800
Bahan Baku	28,173,976	96,709,618
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	42.702,569	116,458,870

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp 16,682,074,883

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16,682,074,883 dan Rp. 16,682,074,883.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai KIPM Banjarmasin berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap

Lainnya.

Tanah

Rp12,431,711,000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 12,431,711,000 dan Rp. 12,431,711,000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2025	14,431,711,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2025	14,431,711,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	14,431,711,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Tanah
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.869 m2	Jl A. yani, Km. 29,42n Yoes	11.749.282.000
2	510 m2	Jl. Angkasa No.16	682.429.000
Jumlah			14,431,711,000

Peralatan dan Mesin

Rp. 4,255,383,615

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,255,383,615 dan Rp.4,255,383,615.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	4,255,383,615
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 30 Juni 2025	4,255,383,615
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(4,045,435,436)
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	4,255,383,615

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp-; dan
Pembelian peralatan komputer senilai Rp0.
Pembelian Alat Rumah Tangga senilai Rp0.
Pembelian Alat Pengolahan senilai Rp 0.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp. 4,634,886,200

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,634,886,200 dan Rp. 4,634,886,200.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	7.310.455.058
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2025	7.310.455.058
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(769,115,118)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	6,436,355,487

Tidak Terdapat Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Banjarmasin

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 276,361,500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 276,361,500 dan Rp. 276,361,500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	276,361,500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo Per 30 Juni 2025	276,361,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(34,054,350)
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	276,361,500

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 8,618,479 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	8,618,479
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2025	8,618,479
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	8,618,479

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. (4,916,267,432)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (4,916,267,432) dan Rp. (4,916,267,432).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

N o	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9,301,909,631	8,816,306,171	485.603.460
2.	Gedung dan Bangunan	6,436,355,487	874,099,571	5.562.255.916
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	319.220.500	122.356.129	196.864.371
4.	Aset Tetap Lainnya	15,650,000	-	15,650,000
	Jumlah	20,682,511,747	(9,812,761,871)	20,873,970,617

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Banjarmasin merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	-		
	Jumlah		

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
	Jumlah		

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –

**C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang Rp0

Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Tagihan TPA			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		

Aset Lainnya Rp0

C.4. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai KIPM Banjarmasin berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut.

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai KIPM Banjarmasin.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	
Nilai Buku Per 30 Juni 2024	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka

Pendek Rp.129,973,398

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 129,973,398 dan Rp. 38,287,051 Utang Pihak Ketiga Terdiri dari, 114,973,398 (Gaji PNS,Gaji P3K dan Gaji PPNNP bulan Bulan Juli 2025), Utang Yang Belum Ditagihkan Rp 0 dan Uang Muka dari KPPN Rp. 15.000.000.

Uang Muka dari KPPN

Rp15.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp. 114,973,398

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp. 114,973,398 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai KIPM Banjarmasin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang kepada Pihak Ketiga	114,973,398
Total		114,973,398

1. Utang Pihak Ketiga Terdiri dari, 114,973,398 (Gaji PNS, Gaji P3K dan Gaji PPNN bulan Juli 2025) (Gaji PNS 65.199.102, Gaji P3K 7.383.167 dan Gaji PPNN bulan Rp. 38.467.000 Bulan Juli 2025).

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
Rp 0

C.5.3. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang belum diterima Tagihannya pada satker balai KIPM Banjarmasin Sebesar Rp. 0

Tabel 26
Rincian Utang Yang belum diterima Tagihannya
TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kuitansi yang Belum di SPM kan	0
2.	Gaji PJLP Bulan Juni 2025	0.
Total		0

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNNP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	
-	
-	
Jumlah	-

Beban yang Masih

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 30

Harus Dibayar Rp0

Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp. 16,609,804,054

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing- masing sebesar Rp. 20,338,625,020 dan Rp. 20,338,625,020. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP Rp.
32,165,000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 32,165,000 dan Rp. 28,245,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,165,000	28,245,000	27.34
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	32,165,000	28,245,000	27.34

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Pengujian,

Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya serta Pendapatan Jasa Karantina Perikanan.

Beban
Pegawai Rp.
1,283,305,322

D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,283,305,322 dan Rp. 1,834,657,939. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	1.040.229.613	1,108,497,340	0,9
Beban Tunjangan-tunjangan	790.999.326	1.513.797.050	0,9
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	4,261,000	0,5
Jumlah Beban	1,283,305,322	1,834,657,939	6.9

Beban
Persediaan Rp.
33,495,002

D.3 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.33,495,002 dan Rp. 18,278,475. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	33,495,002	18,278,475	
Beban Persediaan untuk Tujuan	-	-	-

Strategis			
Beban Persediaan Bahan Baku			
Jumlah Beban	33,495,002	18,278,475	

Beban Barang dan Jasa Rp. 495,941,414

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 495,941,414 dan Rp. 615,316,650. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	300,071,915	366,244,661	0,84
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	22,605,200	0,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	379.000	2,228,300	8,14
Beban Honor Operasional Satker	38,740,000	33,440,000	0,68
Beban Barang Operasional Lainnya	4,495,400	37,850,520	0,48
Beban Bahan	20,143,841	4.873.000	0,07
Beban Honor Output Kegiatan	3.400,000	2.040,000	0,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	21,230,496	0,88
Beban Langganan Listrik	21,528,831	66,666,770	0,73
Beban Langganan Telepon	4,336,770	515,172	1,00
Beban Langganan Air	8,113,500	8,201,387	1,32

Beban Sewa	12.000.000	25,000,000	100
Beban Jasa Lainnya	81,232,157	24,457,144	0,63
Jumlah Beban	615.316.650	857.073.937	0,71

Beban
Pemeliharaan
Rp.
105,093,674

D.5 Beban Pemeliharaan.

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 105,093,674 dan Rp. 300,240,668. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,622,000	169,645,900	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,452,674	119,682,268	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	6.019.000	10,912,500	
Beban Persediaan suku cadang	-	-	
Jumlah Beban	105,093,674	300,240,668	

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp29,014,283

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 29,014,283 dan Rp. 162,984,789. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,110,000	153,234,789	7,05
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	9,750,000	0,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,654,283		0,47
Jumlah Beban	29,014,283	162,984,789	0.53

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat

TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	246,364,360	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	69,944,307	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	7.538.291	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	-		
Beban Amortisasi Software	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	
Jumlah Amortisasi	-		
Jumlah Beban	-	323,846,958	

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Penjualan Alat Kantor	-	-	
Selisih Kurs	-	-	
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp16,677,475,356 1

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp16,677,475,356 dan Rp. 20,767,599,191.

Defisit LO
Rp(1,914,684,695
)

E.2. Surplus/Defisit-LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp ((1,914,684,695)) dan (3,176,871,733) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah

sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp.
1,847,013,393

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1,847,013,393 dan Rp. 2,747,897,562.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(32,165,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,849,797,567
Transfer Masuk	133.100
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2.747.897.562

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp(32,165,000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1,849,797,567.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 29,513,926 terdiri dari:

Tabel 32
Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Sekretariat Badan	29,513,926
2.	Health Certificate	Sekretariat Badan	
Jumlah			29.513.926

Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 Sebesar Rp. 133,100.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir Rp.
16,609,804,054*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 16,609,804,054 dan Rp. 20,338,625,020.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat Kejadian-kejadian Penting setelah tanggal Neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp.448.500.000 dan realisasi senilai Rp. 87.293.630 atau 16,46% dari pagu, dengan rincian disajikan pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Satker Balai KIPM Banjarmasin per 30 Juni 2025.

Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan (terrealisasi) dikarenakan msh terdapat saldo blokir AA.

*Tabel 34
Program Prioritas Nasional TA 2025*

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3989.PDC - Sertifikasi Produk	45,000,000	8,139,293	18.09
3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	60.000.000	35.110.496	58.52
3989.PDC - Sertifikasi Produk	90.000.000	6.680.000	7.42
3989.PDF - Sertifikasi Lembaga	90.000.000	3.620.000	4.02
3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	25.000.000	6,849,841	7.69
3989.QIC - Standarisasi Lembaga	15.000.000	-	-

7010.PDD. Standarisasi Lembaga	55.000.000	3.500.000	6.33
71010. PBR - Pengawasan dan Pengendalian Produk	60.000.000	23.394.000	38.99
7010.QIA was awasan dan Pengendalian Produk	8.500.000	-	
Total	448.500.000	87.293.630	19,46%

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Rachmiyati,S.E
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM: Untung Ifriansyah,
S.Sos
Bendahara Pengeluaran : Yusniati Aritonang,
A.Md.,S.E

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM

WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN

NO DOKUMEN : 00001

TANGGAL/ PERIODE : 30 Juni 2025 / SEMESTER I TA 2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	65.379,00	
2	K	522112	Beban Langganan Telpn		65.379,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan telpn yang masih harus diayar

Dibuat oleh:
Yusniati Artonang

Yusniati

30-Jun-25

Disetujui oleh :
Hani Rahman



30-Jun-25

Direkam oleh :
Yusniati Artonang

Yusniati

30-Jun-25

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM

WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN

NO DOKUMEN : 00002

TANGGAL/ PERIODE : 30 Juni 2025 / SEMESTER I TA 2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	10.623.565,00	
2	K	522111	Beban Langganan Listrik		10.623.565,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban Langganan Listrik yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Artonang

Yusniati Artonang

30-Jun-25



Disetujui oleh:
Ham Rahman

Ham Rahman

30-Jun-25

Direkam oleh:
Yusniati Artonang

Yusniati Artonang

30-Jun-25

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM
WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN
NO DOKUMEN : 0003
TANGGAL/ PERIODE : 30 Juni 2025 / SEMESTER I TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	4.018.200,00	
2	K	521111	Beban Langganan Daya Dan Jasa Lainnya		4.018.200,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban Langganan Daya Dan Jasa Lainnya yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Arintonang

Yusniati

30-Jun-25

Disetujui oleh :
Hani Rahman



Direkam oleh :
Yusniati Arintonang

Yusniati

30-Jun-25

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM

WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN

NO DOKUMEN : 0004

TANGGAL/ PERIODE : 30 Juni 2025 / SEMESTER I TA 2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	2.326.000,00	
2	K	522113	Beban Langganan Air		2.326.000,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan PDAM/ Air yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Arintonang

Yusniati

30-Jun-25

Disetujui oleh :
Hani Rahman

Hani Rahman

30-Jun-25

Direkam oleh :
Yusniati Arintonang

Yusniati

30-Jun-25

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BKIPM

WILAYAH : 1500 PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649593 BALAI KIPM BANJARMASIN

NO DOKUMEN : 0004

TANGGAL/ PERIODE : 30 Juni 2025 / SEMESTER I TA 2025

TAHUN ANGGARAN : 2024

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | |
|--|--|
| 1 ☐ Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☒ Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ Penyisihan Piutang | 15 ☐ Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ Penghapusan Piutang | 16 ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ Penyusutan | 17 ☐ Transfer Masuk |
| 8 ☐ Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ Transfer Keluar |
| 9 ☐ Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ Persediaan | 20 ☐ Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	2	3	4	5	6
1	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	12.635.428,00	-
2	K	512441	Beban Pegawai/Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	12.635.428,00

URAIAN PENYESUAIAN

Beban langganan PDAM/ Air yang masih harus dibayar

Dibuat oleh:
Yusniati Arintonang



30-Jun-25

Disetujui oleh :
Hani Rahman




30-Jun-25

Direkam oleh :
Yusniati Arintonang



30-Jun-25

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 15/07/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 15/07/25 4:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,849,797,567
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	32,165,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	21,629,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	10,536,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	398,548,680	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,096	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	23,663,700	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	9,425,668	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	13,915,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,923,574	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	19,336,140	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	39,510,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11,815,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	48,499,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,170	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,562,880	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,025,152	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,080,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,896,800	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	5,325,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	565,714,909	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	56,711,032	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	265,623,115	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	379,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	38,740,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,495,400	0
3.0	521211	Belanja Bahan	20,143,841	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,872,700	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	11,894,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	32,152,396	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,402,149	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,439,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	12,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	77,308,028	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65,622,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 15/07/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 15/07/25 4:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33,452,674	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,110,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,654,283	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	520
JUMLAH			1,881,963,087	1,881,963,087

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Banjarbaru, 15 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP

196812231989031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 4:51 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,536,000	28,245,000	(17,709,000)	(62.698)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,536,000	28,245,000	(17,709,000)	(62.698)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,536,000	28,245,000	(17,709,000)	(62.698)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,283,305,322	1,834,657,939	(551,352,617)	(30.052)
Beban Persediaan	33,495,002	18,278,475	15,216,527	83.248
Beban Barang dan Jasa	495,941,414	615,316,650	(119,375,236)	(19.401)
Beban Pemeliharaan	105,093,674	300,240,668	(195,146,994)	(64.997)
Beban Perjalanan Dinas	29,014,283	162,984,789	(133,970,506)	(82.198)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 4:51 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	273,618,247	(273,618,247)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,946,849,695	3,205,096,768	(1,258,247,073)	(39.258)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,936,313,695)	(3,176,851,768)	1,240,538,073	(39.049)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	21,629,000	0	21,629,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	21,629,000	0	21,629,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(19,965)	19,965	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	19,965	(19,965)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	21,629,000	(19,965)	21,648,965	(108,43 4.586
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,914,684,695)	(3,176,871,733)	1,262,187,038	(39.731)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,914,684,695)	(3,176,871,733)	1,262,187,038	(39.731)

Keterangan :

BELUM FINAL

- *) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
- *) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Banjarbaru, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP
NIP 196812231989031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (649593) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN

Tgl Data : 15/07/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 15/07/25 4:52 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,677,475,356	20,767,599,191	(4,090,123,835)	(19.69)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,914,684,695)	(3,176,871,733)	1,262,187,038	(39.73)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,847,013,393	2,747,897,562	(900,884,169)	(32.78)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(67,671,302)	(428,974,171)	361,302,869	(84.22)
EKUITAS AKHIR	16,609,804,054	20,338,625,020	(3,728,820,966)	(18.33)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Banjarbaru, 15 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP

NIP 196812231989031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN 649593

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM
Tgl Cetak : 15/07/25 4:52 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	39,870,000	32,165,000	(7,705,000)	80.67	52,960,000	28,245,000	(24,715,000)	53.33
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,870,000	32,165,000	(7,705,000)	80.67	52,960,000	28,245,000	(24,715,000)	53.33
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	39,870,000	32,165,000	(7,705,000)	80.67	52,960,000	28,245,000	(24,715,000)	53.33
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,651,149,000	1,849,797,567	(3,801,351,433)	32.73	6,173,055,000	2,775,117,562	(3,397,937,438)	44.96
1. Belanja Pegawai	3,050,491,000	1,223,358,481	(1,827,132,519)	40.10	3,489,184,000	1,745,994,500	(1,743,189,500)	50.04
2. Belanja Barang	2,600,658,000	626,439,086	(1,974,218,914)	24.09	2,683,871,000	1,029,123,062	(1,654,747,938)	38.34
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN 649593

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM
Tgl Cetak : 15/07/25 4:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,651,149,000	1,849,797,567	(3,801,351,433)	32.73	6,173,055,000	2,775,117,562	(3,397,937,438)	44.96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Banjarbaru, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Balai

HAFIT RAHMAN, S.PI., MP
NIP 196812231989031001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (649593) Balai KIPM Banjarmasin Kode dan Nama UAPPAW : (1500) KALIMANTAN Selatan
Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP
Kode dan Nama K/L : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V
	a. Pagu/DIPA		V
	b. Estimasi PNBP		V
	c. Belanja		V
	d. Pengembangan Belanja		V
	e. Pendapatan		V
	f. Pengembangan Belanja		V
	g. Kas BLU		V
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V
	i. Kas Hibah		V
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1,	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resipokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	Ya		Ya
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	29.380.826		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual		V	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	V		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN	
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk	
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL, (Hafti Rahman S.Pl., MP) NIP.196812221989031001 	Balikpapan, 9 Juli 2025 Penelaah, (Yusniati Arintonang, A.Md, S.E) NIP.19860617 201012 2 001 